

## Pendapatan Retribusi Daerah- Pungli dan Tilap Uang Sampah

Banyak Laporan Masuk, Danny Perintahkan Evaluasi Pj Ketua RT/RW Nakal



Sumber gambar:

<https://beritakotamakassar.com/berita/2024/06/20/pungli-dan-tilap-uang-sampah/>

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap para pejabat ketua RT/RW. Dia bahkan sudah memerintahkan seluruh camat maupun lurah untuk melakukan evaluasi dan mendata seluruh pj ketua RT/RW di wilayahnya masing-masing.

Sesuai laporan yang masuk, ternyata banyak Pj RT/RW yang tidak bekerja secara efektif. Malah ada diantaranya yang sudah meninggal, pindah domisili, sakit, dan mengundurkan diri. Fatalnya lagi, sejumlah RT/RW dilaporkan melakukan pungli dan menyalahgunakan retribusi sampah di wilayahnya masing-masing.

“Jadi saya perintahkan kepada camat dan lurah untuk melakukan evaluasi terhadap RT/RW di wilayahnya masing-masing. Banyak laporan masuk, soal posisi RT/RW yang lowong. Ada juga yang nakal-nakal,” ungkap Danny saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh pimpinan OPD, camat, lurah, dan direksi Perusda, Rabu (19/6) di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani. Orang nomor satu Makassar itu mengemukakan, memang sudah waktunya para pj ketua RT/RW tersebut dievaluasi untuk memaksimalkan struktur organisasi dengan baik. “Memang harus segera dievaluasi. Harus ada pergantian. Karena ternyata pj RT/RW banyak yang tidak aktif. Ada yang berkinerja rendah. Saya kan lagi melihat efisiensi,” kata Danny. Dia mengestimasi jumlah Pj RT/RW yang tidak maksimal bekerja mencapai ratusan orang.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Kalau berdasarkan laporan tadi malam (Rabu malam), mencapai ratusan. Banyak. Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang, mohon maaf, tilap uang sampah. Itu harus diberhentikan,” tegasnya.

Orang nomor satu Makassar itu meminta seluruh camat untuk menyerahkan data-data terkait pj RT/RW di wilayah masing-masing. Rencananya, Danny akan memanggil satu persatu para pj ketua RT/RW. Termasuk mereka yang sudah tidak aktif lagi untuk ditanyakan keseriusannya dalam

bertugas.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Biringkanaya Juliaman mengakui ada beberapa pj ketua RT/RW di wilayahnya yang sudah non aktif dengan alasan beragam. “Ada yang meninggal, mengundurkan diri karena alasan pekerjaan. Ada yang tidak aktif, jarang komunikasi dan bertemu dengan warganya serta pemerintah setempat. Itu semua akan jadi bahan evaluasi untuk kami usulkan agar diganti,” kata Juliaman saat dihubungi BKM, kemarin. Sementara itu, di wilayah Kecamatan Panakkukang, tercatat sekitar 80 hingga 90 Pj RT/RW yang non aktif. Camat Panakkukang Ari Fadly mengatakan ada beberapa alasan sehingga puluhan pj ketua RT/RW tersebut tidak lagi aktif. Karena sakit, sudah meninggal, pindah domisili, dan ada juga yang sengaja mengundurkan diri karena harus bertugas atau pindah domisili di daerah lain. “Hampir 80 sampai 90-an. Tapi itu juga sudah akumulasi dari 2023 lalu,” kata Ari fadly. Bahkan, sesuai dengan pernyataan wali kota, di wilayahnya ada juga pj ketua RT/RW yang ditemukan menyelewengkan iuran sampah hingga melakukan pungli ke warga.

“Jadi misalnya ada warga mau urus akta warisan, kan butuh itu tanda tangan RT/RW. Mereka dimintai sejumlah uang. Yang seperti inilah juga yang akan kami evaluasi,” tegas mantan Camat Mamajang itu. Di Kecamatan Manggala juga demikian. Kurang lebih 35 pj ketua RT/RW tidak bekerja secara maksimal. Camat Manggala Andi Eldi Indra Malka mengatakan, ada beberapa kriteria sehingga sejumlah pj ketua RT/RW mau diganti. “Seperti meninggal dunia, mundur karena sakit, ada yang sudah lansia. Bahkan ada yang ditemukan tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat. Bahkan ada beberapa yang ditemukan menyalahgunakan yang retribusi yang ditarik dari warga. Itu semua yang jadi perhatian kami. Ada yang nakal. Dia pakai uang retribusi dari warga. Yang begitu sangat mendesak diganti karena menjadi beban dan persoalan,” tandasnya. (rhm)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta’.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/06/20/pungli-dan-tilap-uang-sampah/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.